

**RANCANGAN LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU	KETERANGAN
			DIBUKA	DITUTUP		
1	Surat Usul / Laporan/ Pengaduan dari SKPD / Instansi tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 hurufh)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi (Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah)	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang Pengadu dan/atau teradu (yang diadakan) memberikan persetujuan tertulis	BKPSDM
2	Berita Acara Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 hurufh)	Informasi terkait Pribadi dengan yang hak	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang Pengadu dan/atau teradu (yang diadakan) memberikan persetujuan tertulis	BKPSDM
3	Resume dan Notulensi Sidang Tim Penyelesaian Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 hurufh)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi : a. Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia. b. Bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang Pengadu dan/atau teradu (yang diadakan) memberikan persetujuan tertulis	BKPSDM

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU	KETERANGAN
			DIBUKA	DITUTUP		
4	Identitas Disiplin PNS yang Dijatuhi Hukuman	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang PNS dijatuhi Hukuman disiplin memberikan persetujuan tertulis	BKPSDM
5	Identitas PNS yang Mengajukan Izin Perceraian/ Perkawinan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h)	Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Setelah terbitnya surat izin / keterangan perceraian dan PNS yang bersangkutan memberikan izin tertulis	BKPSDM
6	Hasil Rekam Medik PNS yang Mengikuti Pengujian Kesehatan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h)	Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka Pemanjang ada izin dari yang mempunyai data untuk kepentingan dinas	BKPSDM
7	Data Hasil Tes Potensi Perorangan PNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h)	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis	BKPSDM

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU	KETERANGAN
			DIBUKA	DITUTUP		
8	Dokumen Formulir Isian Pegawai (FIP)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h)	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka untuk data administrasi kepegawaian, kecuali data yang sifatnya pribadi dan data terkait disiplin	BKPSDM
9	Biodata Elektronik PNS (database)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h)	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka untuk data administrasi kepegawaian, kecuali data yang sifatnya pribadi dan data terkait disiplin	BKPSDM
10	Data Rencana Penempatan PNS dalam Jabatan Struktural	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja	Sampai dengan pelantikan	BKPSDM
11	Hasil Penilaian Uji Kompetensi PNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h)	Akan mengungkap hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang yang berkewenangan (instansi yang meminta penilaian) memberikan persetujuan tertulis dan khusus data pribadi yang bersangkutan	BKPSDM

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU	KETERANGAN
			DIBUKA	DITUTUP		
12	Data Nama PNS yang Akan Diangkat Dalam Jabatan a. Pimpinan Tinggi b. Administrator c. Pengawas	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Melindungi Hak Pribadi	Sampai dengan pelantikan	BKPSDM
13	Daftar Nilai Seleksi Jabatan Struktural OPD dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf i)	Akan menimbulkan keresahan dan kolusi	Melindungi data pribadi	Terbuka sepanjang yang berkewenangan (instansi yang meminta penilaian) memberikan persetujuan tertulis dan khusus data pribadi yang bersangkutan)	BKPSDM
14	Hasil Tes Kompetensi CAP Pejabat Struktural OPD: a. Pimpinan Tinggi b. Administrator c. Pengawas	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h)	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi	Terbuka sepanjang yang berkewenangan (instansi yang meminta penilaian) memberikan persetujuan tertulis dan khusus data pribadi yang bersangkutan)	BKPSDM

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU	KETERANGAN
			DIBUKA	DITUTUP		
15	Data Nilai Peserta Ujian di Pemerintahan Kota Pontianak: a. CPNS b. Ujian Dinas c. Ujian KPPI d. Penggunaan Gelar	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h)	Menimbulkan keresahan	Mencegah KKN	Sampai dengan pengumuman	BKPSDM
16	Dokumen Pengajuan Permohonan Keringanan Wajib Pajak	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h dan huruf i	Menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama masih berlaku	BKPSDM
17	Data Sengketa Pajak Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a dan huruf j	Dapat menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi /mengamankan data sengketa Pajak	Sampai ada perintah dari penegak hukum/yang berwenang	BKPSDM
18	Dokumen Pemeriksaan Pengawasan Internal dan External	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan huruf j	Menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama masih berlaku	BKPSDM
19	Data Wajib Pajak terkait: a. Omzet b. Jumlah Pajak c. Hasil Uji Petik	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan huruf j	Menyebabkan Persaingan Usaha	Melindungi hak wajib pajak daerah	Selama masih berlaku	BKPSDM

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU	KETERANGAN
			DIBUKA	DITUTUP		
20	Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak yang belum diaudit	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h) b. UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan huruf j	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit	BKPSDM
21	Dokumen Sistem Mutu (Doksistu) Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf b)	a. Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu b. Terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat c. Keresahan masyarakat	Melindungi kompetensi kelembagaan sertifikasi	Sesuai Undang-Undang yang berlaku	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak
22	Proses Uji Laboratorium tentang Keamanan Pangan Produk Segar	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf b)	a. Terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat b. Keresahan masyarakat c. Menimbulkan persepsi / pemahaman hasil uji Laboratorium yang berbeda	a. Menjamin praktek persaingan usaha b. Menjamin perlindungan Hak Kekayaan intelektual c. Menjamin kerahasiaan hasil uji laboratorium terkait keamanan produk segar	Sampai terbitnya hasil uji laboratorium Tentang Keamanan Pangan Produk	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU	KETERANGAN
			DIBUKA	DITUTUP		
23	Dokumen/ Data Uji Mutu Pangan diProdusen	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf b)	a. Terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat b. Keresahan masyarakat c. Menimbulkan persepsi/ pemahaman hasil uji mutu pangan yang berbeda	a. Menjamin praktek persaingan usaha b. Menjamin perlindungan Hak Kekayaan intelektual c. Menjamin kerahasiaan hasil uji lmutu pangan atau data produsen terlindungi	Sampai dengan terbitnya sertifikat	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak
24	Dokumen Tindak Lanjut Hasil	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf i)	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Membantu badan publik dalam penyusunan kebijakan	Terbatas sampai dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak
25	Dokumen Pemeriksaan dan Reviu (Nota Analisa, Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan dan Nota Hasil Pemeriksaan)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf i)	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Terbatas sampai dengan telah dilaporkan kepada BPK (sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.	Inspektorat

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU	KETERANGAN
			DIBUKA	DITUTUP		
		b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, (Pasal 3)				
26	Arsip Dinamis yang Menyangkut Dokumen SPJ Keuangan Kegiatan dan Perjalanan Dinas	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf i)	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Terbatas sampai setelah selesai diaudit	BKD Kota Pontianak
27	Data Calon Orang Tua Angkat, Orang Tua Angkat. Calon Anak Angkat dan Anak Angkat Meliputi: a. Nama b. Foto c. Alamat d. Riwayat Hidup	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h)	Data pribadi orang tua angkat dan anak angkat tidak terjaga kerahasiaannya	Data pribadi orang tua angkat dan anak angkat terjaga kerahasiaannya	Terbuka apabila pihak yang rahasiannya diungkap memberikan persetujuan tertulis	Dinas Sosial Kota Pontianak

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU	KETERANGAN
			DIBUKA	DITUTUP		
28	Data Pribadi Penerima Manfaat Dalam Panti	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h)	Data pribadi penerima manfaat dalam panti tidak terjaga kerahasiaannya	Data pribadi penerima manfaat dalam panti terjaga kerahasiaannya	Terbuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis	Dinas Sosial Kota Pontianak
29	Hasil Pengawasan Koperasi meliputi: a. Pokok-Pokok temuan hasil pengawasan koperasi b. Rekomendasi tindak lanjut temuan hasil pengawasan koperasi c. Sanksi yang diterapkan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf e) b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, (Pasal 39 ayat 3)	a. Dapat menimbulkan keresahan masyarakat yang pada akhirnya bisa berakibat rush money atau pengambilan uang secara besar-besaran b. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi	a. Menghindari terjadinya keresahan yang akhirnya bisa berakibat rush money atau pengambilan uang secara besar-besaran b. Menjaga kepercayaan masyarakat terhadap koperasi	Terbuka apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan perkarapidana di pengadilan	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak
30	Laporan Hasil Uji dan Sertifikat Kalibrasi	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf b)	a. Pelanggaran terhadap ISO/IEC 17025:2017 b. Persaingan usaha yang tidak sehat	a. Menjamin praktek persaingan usaha b. Menjamin perlindungan Hak Kekayaan intelektual	5 Tahun	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU	KETERANGAN
			DIBUKA	DITUTUP		
		b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, (Pasal 69)	c. Menimbulkan persepsi / pemahaman hasil uji / kalibrasi yang berbeda	c. Menjamin kerahasiaan hasil uji/kalibrasi terkait Kepentingan internal /konsumen		Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak
31	Database Napiter	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf c dan i) b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, (Pasal 25 dan 26)	a. Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara b. Membahayakan sistem Intelijen Negara c. Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen d. Membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan Rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen	a. Melindungi pertahanan dan keamanan Negara b. Melindungi sistem intelijen negara c. Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen d. Melindungi keselamatan personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara (Pasal 25 ayat 4)	Kantor Kesatuan Bangsa, Sosial dan Politik Kota Pontianak

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU	KETERANGAN
			DIBUKA	DITUTUP		
32	Database Pengawasan Simpatisan Radikal	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf c dan i)</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, (Pasal 25 dan 26)</p>	<p>a. Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara</p> <p>b. Membahayakan sistem Intelijen Negara</p> <p>c. Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen</p> <p>e. Membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen</p>	<p>a. Melindungi pertahanan dan keamanan Negara</p> <p>b. Melindungi sistem intelijen negara</p> <p>c. Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen</p> <p>d. Melindungi keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen</p>	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara (Pasal 25 ayat 4)	Kantor Kesatuan Bangsa, Sosial dan Politik Kota Pontianak
33	Laporan Penanganan Konflik	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf c dan i)</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, (Pasal 25 dan 26)</p>	<p>a. Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara</p>	<p>a. Melindungi pertahanan dan keamanan Negara</p> <p>b. Melindungi sistem intelijen negara</p>	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari	Kantor Kesatuan Bangsa, Sosial dan Politik Kota Pontianak

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU	KETERANGAN
			DIBUKA	DITUTUP		
			<p>b. Membahayakan sistem Intelijen Negara</p> <p>c. Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan Pelaksanaan fungsi Intelijen</p> <p>d. Membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen</p>	<p>c. Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen Melindungi keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen</p>	<p>Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara (Pasal 25 ayat 4)</p>	
34	Usulan Upah Minimum Kota Pontianak	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf i)	a. Dapat mengganggu Proses Penetapan Upah Minimum	Menjaga iklim kondusif	Sampai upah minimum ditetapkan gubernur	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Pontianak

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU	KETERANGAN
			DIBUKA	DITUTUP		
		b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, (Pasal 89 ayat (3))	b. Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur			
35	Usulan Penangguhan Upah Minimum	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf i) b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, (Pasal 90 ayat 2)	a. Menimbulkan keresahan b. Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga iklim kondusif	Sampai terbit surat penangguhan upah minimum	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Pontianak
36	Nota Pemeriksaan pengawasan Ketenagakerjaan yang meliputi: a. Nota Pemeriksaan Pertama b. Nota Pemeriksaan Kedua c. Nota Pemeriksaan Khusus	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf i) b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya	Mengungkap hasil pemeriksaan dan membuka rahasia Pengusaha	Melindungi hak pribadi Pengusaha	a. Sampai di laksanakannya hasil pemeriksaan oleh Perusahaan b. Sampai dilakukannya pemeriksaan berkala	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Pontianak

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU	KETERANGAN
			DIBUKA	DITUTUP		
		Undang - Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia, (Pasal 1 dan Pasal 5)				
37	Rincian Nilai Investasi, Produksi dan Pemasaran Perusahaan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf) b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, (Pasal 3 dan 4) c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, (Pasal 69)	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan perusahaan yang datanya diekspose	Dapat melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha industri yang tidak sehat dan menjaga iklim usaha industrikan kondusif	10 Tahun	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Pontianak

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU	KETERANGAN
			DIBUKA	DITUTUP		
38	Data Pribadi Penduduk Adalah Data Perseorangan Tertentu Yang Disimpan, Dirawat dan Dijaga Kebenaran Serta Dilindungi Kerahasiaannya	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h dan j) b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, (Pasal 79 Ayat 1)	Bertentangan dengan hak pribadi yang berpotensi disalahgunakan	Melindungi Data Pribadi penduduk yang bersifat Rahasia	Atas ijin yang bersangkutan dan kepentingan publik berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak
39	Informasi Hasil Pengujian Kualitas lingkungan yang dikeluarkan oleh Balai Pengujian dan Laboratorium Lingkungan Hidup (BPL2H)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h dan j) b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, (Pasal 3 ayat 2)	Melanggar Kode Etik kerjasama antara Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan dan Konsumen	Melindungi hak informasi konsumen atas hasil pengujian kualitas lingkungan	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari klien yang bersangkutan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU	KETERANGAN
			DIBUKA	DITUTUP		
40	Identitas Korban Pada Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AKB Provinsi Lampung	<p>a. Undang-Undang Nornor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, (Pasal 10 huruf c)</p> <p>c. Undang - undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, (Pasal 5 ayat 1 huruf i)</p>	Mengungkap rahasia pribadi (mengganggu kondisi psikologis dan traumatis)	Melindungi hak pribadi	Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan bermaterai	Dinas P2KBP3A

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU	KETERANGAN
			DIBUKA	DITUTUP		
41	Identitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Pada Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AKB Provinsi Jawa Tengah	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Pasal 17 ayat 2)</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 19</p>	Mengungkap rahasia pribadi (mengganggu kondisi psikologis)	Melindungi hak pribadi	Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan bermaterai	Dinas P2KBP3A
42	Identitas Anak yang Konsultasi Telepon Melalui Program TESA 129	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Pasal 17 ayat 2)</p>	Mengungkap rahasia pribadi (mengganggu kondisi psikologis)	Melindungi hak pribadi	Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan secara Tertulis dengan bermaterai	Dinas P2KBP3A

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU	KETERANGAN
			DIBUKA	DITUTUP		
43	Alamat Shelter Penampungan Korban yang Sedang Ditangani /Diberikan Pendampingan	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, (Pasal 10 huruf</p>	Kelangsungan hidup korban kekerasan menjadi terancam	Keamanan dan hak pribadi korban kekerasan dapat terlindungi	Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan secara Tertulis dengan bermaterai	Dinas P2KBP3A
44	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa (Dokumen Lelang/ Seleksi dan Dokumen Kualifikasi)	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf b)</p> <p>b. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (Pasal 23)</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, (Pasal 3 dan 4)</p>	<p>a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat</p> <p>b. Membuka rahasiaperusahaan</p> <p>c. Terhambatnya proses penilaian dokumen</p>	<p>a. Perlindungan hak kekayaan intelektual dan menjaga persaingan usaha yang tidak sehat</p> <p>b. Melindungi kerahasiaan perusahaan</p> <p>c. Menjaga objektivitas penilaian dokumen</p>	Terbatas, sampai Dengan penetapan penyedia barang dan jasa	Sekretariat Daerah Kota Pontianak (BLP)

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU	KETERANGAN
			DIBUKA	DITUTUP		
45	Rincian Harga Penawaran dari Calon Penyedia Barang/Jasa	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf i dan huruf j)</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, (Pasal 3 dan 4)</p>	Membuka rahasia perusahaan yang dijamin oleh Undang-Undang	Melindungi hak atas rahasia dagang bagi penyedia barang/jasa	Setelah penandatanganan kontrak	Sekretariat Daerah Kota Pontianak (BLP)
46	Rincian Harga Satuan Pada Perhitungan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang Pelaksanaannya Sedang Dalam Proses	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik, (Pasal 17 huruf i dan huruf j)</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, (Pasal 3 dan 4)</p>	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya ketidakwajaran penawaran	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar	Terbatas sampai Dengan proses Pengadaan Barang Jasa selesai	Sekretariat Daerah Kota Pontianak (BLP)

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU	KETERANGAN
			DIBUKA	DITUTUP		
47	Rencana Lokasi Jembatan/ Bangunan Dan Detail Trace Jalan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf (e) angka 4)	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Mencegah spekulasi tanah	Sampai dengan selesainya proses pembebasan tanah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak
48	Peta Rencana Struktur Ruang, Peta Rencana Pola Ruang dan Peta Penetapan Kawasan Strategis Pada Raperda RT RW Provinsi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 6 Ayat 3) huruf (e) dan (Pasal 17 huruf (e) butir 4)	Munculnya para spekulasi tanah	Melindungi Masyarakat dari para spekulasi tanah	Sampai dengan disahkannya RT/RW Provinsi Raperda menjadi Perda	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak
49	Data Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Pontianak	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf a dan h)	a. Berpotensi terjadinya pemerasan oleh Oknum kepada pelanggar b. Menghambat proses penegakan Perda oleh Satpol PP c. Berpotensi melanggar Hak dari pelanggar Perda	a. Melindungi privasi individu Pelanggar Perda b. Memperlancar dalam proses penegakan Perda	10 Tahun	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU	KETERANGAN
			DIBUKA	DITUTUP		
50	Rencana Operasi dan Target Operasi Penindakan	Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf a dan h)	a. Menyebabkan bocornya informasi rencana penindakan b. Menghambat proses penegakan Perda oleh Satpol PP c. Membahayakan petugas operasi	a. Keberhasilan upaya penindakan lebih besar b. Memperlancar dala mproses penegakan Perda	5 Tahun	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
51	Daftar Sistem Kunci Sandi (SISAN), kunci/password yang ada di kamar sandi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak	Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b dan huruf j	Dapat mengganggu sistem keamanan informasi	Menjaga sistem keamanan informasi	Selama masih digunakan/ berlaku	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak
52	Data pribadi pelapor dalam sistem pengaduan publik di Aplikasi LAPOR!	Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf a dan h)	Dapat mengganggu kenyamanan dan keamanan pelapor	Melindungan hak pelapor pengaduan pelayanan publik di Kota Pontianak	Terbuka apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU	KETERANGAN
			DIBUKA	DITUTUP		
53	Informasi tentang Dugaan Praktek Korupsi yang Meliputi Identitas Pelapor Kronologi, dan atau Objek Aduan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf a angka 2) b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Pasal 15 huruf a)	Masyarakat enggan Berpartisipasi untuk mengawasi dan melaporkan dugaan praktek KKN	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan praktek KKN	Terbuka apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan	Inspektorat Kota Pontianak
54	Data Laporan hasil pemeriksaan OPD dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf a angka 2)	Dapat mengganggu hasil pemeriksaan lebih lanjut dan kebijakan	Melindungi hasil pemeriksaan dari intervensi pihak luar	Terbuka apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan	Inspektorat Kota Pontianak

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU	KETERANGAN
			DIBUKA	DITUTUP		
55	Laporan Dugaan Terjadinya Suatu Tindak Pungli di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf i angka 1 dan angka 2)	a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana b. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana	Melindungi identitas informan, pelapor, saksi dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana yang bersifat rahasia	Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara tindak pidana di pengadilan	Inspektorat Kota Pontianak
56	Data status Kesehatan pasien by name	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf i angka 1 dan angka 2) 2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Daftar Informasi yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Kesehatan.	Mengungkap rahasia pasien	Menjaga privasi pasien	10 tahun atau sampai ada persetujuan tertulis	Dinas Kesehatan Kota Pontianak

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU	KETERANGAN
			DIBUKA	DITUTUP		
57	Hasil pemeriksaan laboratorium terkait adanya kejadian luar biasa(KLB) penyakit menular byname	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf i angka 1 dan angka 2)	Mengungkap rahasia pribadi beserta keluarganya dan menimbulkan gejala dimasyarakat	Menjaga privasi pasien terkait data status kesehatannya	5 tahun atau sampai ada persetujuan tertulis	Dinas Kesehatan Kota Pontianak
58	Dokumen terkait fasilitas Kesehatan dan hasil visitasi fasilitas pelayanan Kesehatan : calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI), laboratorium, klinik	2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1Tahun 2015 tentangDaftar Informasi yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Kesehatan.	Mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Menjaga privasi pasien dan citra sarana kesehatan	Sampai ada persetujuan tertulis	Dinas Kesehatan Kota Pontianak

